

ABSTRAK

Judul dari tulisan ini yaitu; **BAKOR PAKEM, Pengawas Aliran Kepercayaan Indonesia: Hubungan dengan Paguyuban-Paguyuban Kepercayaan tahun 1954-1978 di Yogyakarta.** Tulisan ini mengajak kepada para pembaca untuk memahami dan mendalami mengenai hubungan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan kelompok Aliran Kepercayaan di daerah Yogyakarta. Dalam memahami sebuah hubungan, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai karakter masyarakat aliran kepercayaan dan karakter Bakor Pakem itu sendiri, dan baru kemudian bisa melihat hubungan diantara keduanya.

Data-data yang diperoleh menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data dari studi pustaka dan sumber wawancara dari orang-orang yang relevan dan berkompeten dibidangnya

Hasil dari penulisan penelitian ini menemukan banyak sekali konflik kepentingan antara kelompok kepercayaan dan kelompok agama “resmi”. Pemerintah dalam hal ini berperan atas penyelesaian konflik dengan membentuk lembaga keagamaan untuk mengatur dinamika masalah keyakinan tersebut. Lembaga yang dibentuk pemerintah tersebut ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah keyakinan dan keagamaan secara netral dan tuntas. Banyak peraturan dan undang-undang “karet” yang disusun hanya menyisakan sebuah permasalahan terselubung yang mengarah kepada pendiskriminasian hak seseorang. Hal tersebut terlihat dari semua *statement* yang dikemukakan para penganut aliran kepercayaan

ABSTRACT

The title of this writing is: “BAKOR PAKEM, The Supervisor of Indonesian Belief Sect: The Relationship to The Belief Association of 1954 – 1978 in Indonesia. This writing invited to the readers for comprehending and deepening on the relationship between the Supervisory Coordinative Institution of Social Belief Sect to the group of belief sect in particularly in Yogyakarta region. In comprehending a relationship, we should initially comprehend the character of belief sect society and character of Bakor Pakem it self, and then it can be seen the relationship amongst both of them.

The data was gained by using qualitative research, by data collection method comprised of literary study and source of interview was from the relevant person and competent in his field.

The result of this research writing founds great deal of interest conflict between the belief group and “official” religious group. The government in this matter has role on the conflict resolution by creating a religious institution for managing the problem dynamic of this belief. The institution established by the government in fact is incapable to resolve belief and religious problems neutrally and thoroughly. There are great deal of ‘flexible’ regulations and legislations of which are compiled merely to reside a covered problems of which is directed to the discrimination of personal right. It seems from all of statements conveyed by the believers of belief sect.